

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) PANDU BERJAYA DI DESA
PANDULANGAN KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PUBLIKASI ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Diploma 3 (D3)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai**



OLEH :

SURIADI

NPM 202163411207

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2024**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) PANDU BERJAYA DI DESA
PANDULANGAN KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PUBLIKASI ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Diploma 3 (D3)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai**



OLEH :

SURIADI

NPM 202163411207

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2024

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) PANDU BERJAYA DI DESA
PANDULANGAN KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

OLEH :

SURIADI

NPM : 202163411207

Telah Diujikan Pada Tanggal
22 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Jumai Latte, S.AB, M.AB, CIQnR

NIDN. 1109129101

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PANDU BERJAYA DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Suriadi¹, Jumai Latte²

Program Studi Administrasi Bisnis
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: suriyadi0812@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to better understand community participation in managing the Pandu Berjaya Village-Owned Enterprise (BUMDES) located in Pandulangan Village, Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency. Qualitative with descriptive qualitative method was chosen as the approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. Primary and secondary data sources were collected, with 6 resource persons selected using purposive sampling. Data analysis procedures include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data shows that BUMDES Pandu Berjaya has an impact both in quality and quantity. The community actively participates in program implementation, especially through the contribution of labor and materials. Although community participation in the decision-making process is still low, their role in evaluation is significant. The researcher suggests creating informal forums to increase community voice, improving community understanding of their relevance in decision-making, expanding business units, and increasing community participation in the direct management of BUMDES Pandu Berjaya.

Keywords: *Role, Community, BUMDES*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami partisipasi masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pandu Berjaya yang berlokasi di Desa Pandulangan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai pendekatan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan, dengan 6 narasumber yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Prosedur analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data menunjukkan bahwa BUMDES Pandu Berjaya memiliki dampak baik secara kualitas maupun kuantitas. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program, terutama melalui kontribusi tenaga dan materi. Meskipun partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih rendah, namun peran mereka dalam evaluasi cukup signifikan. Peneliti menyarankan untuk menciptakan forum informal untuk meningkatkan suara masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang relevansi mereka dalam pengambilan keputusan, memperluas unit usaha, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen langsung BUMDES Pandu Berjaya.

Kata Kunci: *Peran, Masyarakat, BUMDES*

PENDAHULUAN

Kartasasmita (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai proses menuju ke arah yang lebih baik dengan cara yang telah dirumuskan. Di sisi lain, pembangunan nasional mengacu pada upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Purba et al., 2021). Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan inisiatif pembangunan yang terarah, terencana, terpadu, menyeluruh, dan berjangka panjang (Mulyani, 2017), seperti yang dikemukakan oleh Kaehe, Ruru, dan Welson (2019). Pembangunan desa merupakan salah satu strategi penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional (Qarisman et al., 2021).

UU No. 6/2014 tentang desa menetapkan landasan legislatif untuk mengatur desa. Undang-undang ini memungkinkan desa-desa yang sebelumnya terbelakang menjadi mandiri dan sukses (Jatmiko et al., 2021). Undang-undang ini memberi desa kemampuan untuk membangun peluang otonomi dan kemandirian, memungkinkan dalam mengelola kebutuhan dan kepentingan masyarakat berdasarkan kondisi sosial-budaya setempat, sehingga memberikan otonomi strategis yang signifikan (Barniat, 2019). Meskipun memiliki otonomi, desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan yang aktif, dan mengurangi ketimpangan pembangunan nasional (BPK Perwakilan Provinsi NTT, 2014). Menurut Anggraeni dalam Suleman dkk., (2020), mendorong kewirausahaan desa merupakan cara yang strategis untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan desa dapat mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mencegah migrasi ke luar desa (Ansari et al., 2013). Prabowo dalam Qarisman dkk., (2021), selanjutnya mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu mendorong kewirausahaan masyarakat.

BUMDes mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa karena diprakarsai dan dioperasikan oleh warga desa (Hayati dan Bariroh, 2021). Soerjono Soekanto (2003: 243) mendefinisikan peran sebagai suatu ciri dinamis kedudukan di mana orang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Siti Rodliyah (2003: 33) dalam kutipan Tamianingsih dan Eprilianto (2022), mendefinisikan peran masyarakat sebagai partisipasi dalam pengembangan, implementasi, kontrol, dan evaluasi inisiatif, yang meningkatkan kemampuan untuk menerima dan menanggapi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui program atau pengelolaan usaha.

BUMDes di Desa Pandulangan secara resmi terbentuk pada 10 Agustus 2021, oleh Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Pandulangan yang bermitra dengan Pemerintah Desa Pandulangan. Badan usaha yang dikenal dengan nama BUMDes PANDU BERJAYA ini telah mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan dilembagakan melalui peraturan desa. Komponen usaha yang dijalankan saat ini meliputi usaha air bersih dan jasa penyewaan peralatan pesta.

Pada Unit Usaha air bersih, BUMDes Pandu Berjaya melakukan pengelolaan dengan cara melibatkan peran masyarakat Desa Pandulangan Sendiri, untuk merawat dan melestarikan pengelolaan air tersebut, untuk pembayaran perbulan masyarakat Pandulangan hanya membayar sebesar Rp 1500 per m³. Namun, pada kenyataannya, para pengelola menghadapi tantangan, dan meskipun harga yang ditawarkan relatif murah, masih ada kredit macet dari sejumlah penduduk.

Sedangkan Kegiatan Usaha Penyewaan Alat Pesta (Tenda dan Kursi) di Desa Pandulanga, BUMDes diberikan anggaran 60 juta rupiah dari keuangan desa untuk membeli peralatan pesta seperti tenda dan kursi. BUMDes mempunyai total 150 kursi dan empat buah tenda. Dan untuk biaya sewa peralatan pesta untuk Kursi sebesar 15000,-/kursi dan Tenda sebesar 150.000,-/petak yang berada di dalam wilayah Desa Pandulangan, sedangkan di luar wilayah Desa Pandulangan dikenakan biaya sewa untuk Kursi sebesar 2000,-/kursi dan Tenda sebesar 200.000,-/petak. Penyewaan peralatan pesta memberikan kelonggaran dan keuntungan bagi masyarakat, namun saat ini minat masyarakat untuk menyewa peralatan pesta masih sedikit.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **"Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Pandu Berjaya di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Pandu Berjaya di Desa Pandulangan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peneliti menggunakan teori Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015), yang meliputi: a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, b) Partisipasi dalam pelaksanaan, dan c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan d) Partisipasi dalam evaluasi.

METODE

Penelitian bertempat di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dipilih untuk dihimpun. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dengan Informan melalui teknik *purposive sampling* berjumlah 6 orang yaitu 3 orang informan kunci terdiri dari Direktur BUMDES Pandu Berjaya, Kepala Desa Pandulangan dan BPD Desa Pandulangan sedangkan 3 orang informan pendukung terdiri dari masyarakat Desa Pandulangan. Data sekunder dihimpun melalui observasi, dokumen, dan studi literatur. Peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas terkait analisis Peran Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDES Pandu Berjaya di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya peneliti akan menyampaikan penemuan dengan didasarkan pada indikator oleh Cohen dan Uphoff dalam Irene (2015), sebagai berikut:

1. Peran dalam pengambilan keputusan

Cohen dan Uphoff dalam Irene (2015) dalam kutipan Rismanita dan Pradana (2022), menyatakan bahwa peran masyarakat dalam pengambilan keputusan mencakup pemilihan opsi dari berbagai ide yang dihasilkan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan bersama. Fungsi ini diekspresikan melalui partisipasi masyarakat dalam debat, pertemuan, dan masukan, serta persetujuan atau penolakan terhadap program. Masukan ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan.

Musyawarah desa sangat penting dalam lingkungan BUMDES. Musyawarah ini mencakup metode negosiasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan (Sahita, 2020). Sebagai contoh, Musyawarah Desa Pandulangan merupakan forum formal yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Pemerintah Desa Pandulangan, di mana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kinerja BUMDES Pandu Berjaya di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang.

Wawancara dengan direktur BUMDES Pandu Berjaya dan Kepala Desa Pandulangan mengungkapkan banyak tahapan proses pemaparan LPJ. Tahap pertama terdiri dari rapat internal antara pengurus, anggota, dan karyawan BUMDES. Tahap berikutnya adalah rapat koordinasi dengan perangkat desa dan Badan Pengawas Desa (BPD), atau disebut juga pra-LPJ. Tahap terakhir adalah mempresentasikan laporan pertanggungjawaban pada rapat desa. Forum ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Pertemuan desa dihadiri oleh perangkat desa, Badan Pengawas Desa (BPD), dan tokoh masyarakat seperti RT, RW, tokoh agama, dan sesepuh.

Irene (2015) menyoroti keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan atau pemerintah. Meskipun demikian, di Pandulangan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Masyarakat mendelegasikan hak partisipasinya kepada para pemimpin ini, yang menyampaikan pemikiran dan sarannya dalam rapat desa. Tujuan-tujuan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Meskipun demikian, dalam forum seperti musyawarah tingkat RT,

anggota masyarakat sering ragu-ragu untuk menyatakan dukungan mereka terhadap BUMDES Pandu Berjaya. Meskipun ada sesi tanya jawab yang dirancang untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, banyak pengunjung yang pasif, pada dasarnya hanya mengamati tanpa menyampaikan pendapat mereka. Bapak Laiman, seorang anggota masyarakat Pandulangan, menyampaikan:

“Untuk kehadirannya masyarakat memang banyak yang hadir. Tapi kalau dari sisi keaktifan dalam forum masih banyak yang belum berani menyampaikan pendapatnya di forum itu.”
(wawancara 13 Mei 2024)

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa berbagai faktor berkontribusi pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk sikap acuh, tidak memiliki keberanian dalam menyuarakan opini, hingga pengetahuan mengenai posisi pribadi di BUMDES yang minim. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memajukan BUMDES Pandu Berjaya dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan manajemen BUMDES berdedikasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam menyampaikan pemikiran, saran, dan ide. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk mengizinkan individu untuk mengkomunikasikan pandangan atau saran mereka dengan manajemen BUMDES melalui diskusi informal.

2. Peran dalam pelaksanaan

Menurut Cohen dan Uphoff, dalam Irene (2015), peran masyarakat dalam implementasi ini ialah berpartisipasi dalam pelaksanaan program setelah tahap perencanaan. Fungsi ini mencakup alokasi sumber daya manusia dan keuangan, di mana masyarakat menyediakan tenaga kerja dan material untuk inisiatif pembangunan.

Program BUMDes yang mencakup unit usaha air bersih dan jasa penyewaan peralatan pesta, memiliki jadwal terperinci yang mencakup tugas perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif dan kooperatif mengikuti jadwal tersebut. Bapak Bahrul Arifin, direktur BUMDes menyampaikan:

“Masyarakat disini cukup kooperatif dan kompak serta disiplin dalam membantu dan mengikuti program yang dilaksanakan oleh BUMDes. Pandu Berjaya”. (Wawancara peneliti 06 Mei 2014).

Selain masyarakat yang cukup disiplin dan kooperatif dalam pelaksanaan program BUMDes, Masyarakat juga menyumbangkan tenaga kerja sebagai bagian dari keterlibatan mereka dalam mengimplementasikan inisiatif BUMDES. Keterlibatan ini termasuk gotong royong, di mana anggota masyarakat membantu menggali pipa jaringan dan memasang meteran air dari rumah ke rumah. Upaya ini dilakukan untuk membantu fasilitas yang dijalankan oleh BUMDES Pandu Berjaya. Meskipun masyarakat melakukan penggalian pipa jaringan dan pemasangan meteran air, namun mereka mendapatkan kompensasi dari BUMDES. Menumbuhkan semangat gotong royong merupakan teknik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberhasilan program (Khoirunnisa dan Salomo, 2019) dalam kutipan (Rismanita and Pradana, 2022)

Sementara itu, peran warga dalam membayarkan layanan oleh BUMDes juga dilaksanakan sebagai komponen materi, yang mana dibayarkan tiap bulannya sebagaimana yang tercantum pada tiap watermeter rumah warga per kubiknya hanya Rp 1500 per m³. Sedangkan pada usaha Jasa Penyewaan Alat Pesta, kursi senilai 15000,-/kursi dan tenda senilai 150.000/petak, masyarakat membayar saat ada hajatan saja baik acara pernikahan, sunatan, akikahan maupun kematian untuk kematian jasa penyewaan tenda digratiskan.

Dalam mengelola BUMDES Pandu Berjaya di Unit Usaha Pengadaan Air Bersih, ternyata para pengelola menghadapi hambatan, dan meskipun biayanya relatif murah, masyarakat tertentu masih ada yang mengalami kredit macet. Sedangkan untuk usaha Jasa Penyewaan Alat Pesta sebagian masyarakat kurang berminat untuk melakukan penyewaan atas peralatan. Warga umumnya lebih memilih untuk menyewa peralatan pesta dari *Wedding Organizer*, yang lebih

menjanjikan sebab banyaknya sumber daya yang dapat diakses. Sementara itu, peralatan pesta di Desa Pandulangan masih belum lengkap, hanya tersedia beberapa item saja. Dan biasanya digunakan untuk kegiatan selain pernikahan, seperti pertemuan warga, karang taruna, desa, lomba, dan sebagainya.

Perihal Peran masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES Pandu Berjaya di Desa Pandulangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan cukup positif dalam hal tenaga dan materi. Namun, kontribusi masyarakat sebagai pengguna jasa masih ditemukan kredit macet dari beberapa masyarakat dan kurangnya minat masyarakat untuk menyewa alat pesta.

3. Peran dalam pengambilan manfaat

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Irene (2015), masyarakat mendapatkan manfaat dari program BUMDES Pandu Berjaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas diukur dari peningkatan *output*, sedangkan kuantitas diukur dari persentase keberhasilan program.

Dari sisi kualitas, masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes, terutama dalam hal pelayanan yang berkualitas pada unit usaha pengelolaan air bersih dan perawatan peralatan pesta. Peneliti menanyakan perihal manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya BUMDES Pandu Berjaya, Bapak Laiman selaku masyarakatan pandulangan mengatakan

“Jika dibandingkan Ketika BUMDes belum ada masyarakat kesulitan mengakses air bersih harus mengambil air kesungai ” (Wawancara peneliti 13 Mei 2024)

Secara kuantitas, BUMDES Pandu Berjaya dapat menyumbang 25% pendapatan desa dari total sisa hasil usaha setiap tahunnya, mengacu pada laporan pertanggungjawaban tahun 2022. Pemerintah Desa mengelola keuangan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan PAMSIMAS, jalan desa, pembinaan kepemudaan, PKK, operasional pemerintah desa, dan keperluan lainnya.

Perihal peran masyarakat dalam pengambilan manfaat BUMDES Pandu Berjaya di Desa Pandulangan. Peneliti menemukan jawaban yang tidak berbeda jauh dengan temuan observasi dan wawancara informan, yang menyiratkan bahwa manfaat BUMDes dari segi kualitas dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dari segi kuantitas, manfaat BUMDes dapat dirasakan dengan meningkatnya PADes yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

4. Peran Dalam Evaluasi

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Irene (2015), peran masyarakat dalam evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program yang telah direncanakan tercapai, apakah sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan.

Manajemen BUMDES Pandu Berjaya menggunakan dua bentuk evaluasi, yaitu evaluasi formal dan informal. Evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan dalam suasana formal, seperti rapat desa atau rapat internal. Evaluasi formal dilakukan setelah penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh manajemen BUMDES Pandu Berjaya. Pada tahap ini, pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BUMDES Pandu Berjaya. Setelah pemaparan laporan pertanggungjawaban, kepala desa dan perangkatnya, BPD, atau perwakilan masyarakat dapat menyampaikan evaluasi.

Selain untuk mengatasi kekurangan dan kesulitan, tujuan dari rapat evaluasi ini adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Selain itu, evaluasi formal juga dilakukan dalam rapat internal. Rapat ini mencakup proses evaluasi terhadap kinerja pengurus BUMDES.

Sementara itu, penilaian non-formal adalah penilaian yang disampaikan oleh masyarakat dalam konteks non-formal, seperti obrolan santai di warung kopi dengan pengurus atau pekerja BUMDes. Dalam diskusi informal ini, manajemen akan membahas lebih lanjut evaluasi yang disampaikan masyarakat dalam rapat internal. Masyarakat sangat terlibat dalam memberikan

umpan balik terhadap pengelolaan BUMDES Pandu Berjaya.

Masyarakat di unit usaha pengelolaan air bersih sering menyampaikan kekhawatiran bahwa pengelola air bersih mengalami kendala teknologi saat mendistribusikan air di lapangan. Sedangkan evaluasi yang seringkali diterima oleh pengurus BUMDes pada unit usaha Penyewaan Alat Pesta adalah kurangnya ketersediaan kursi dan meja. Seperti yang diungkapkan Bapak Bahrul Arifin:

“Jadi, anggota unit usaha jasa itu dipilih melalui musyawarah tingkat RT karena lembaga ini milik Desa. Sehingga siapapun yang terpilih dalam musyawarah tersebut otomatis akan menjadi anggota. Namun, seringkali terjadi kendala teknis di lapangan karena anggota tersebut kurang mumpuni dan tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan” (Wawancara peneliti 06 Mei 2024)

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemantauan pembangunan. Dalam situasi ini, fokusnya adalah pada transparansi kegiatan dan pengelolaan dana BUMDES. Berdasarkan pengamatan lapangan, masyarakat diberikan akses sederhana terhadap informasi laporan pertanggungjawaban setiap enam bulan sekali. Informasi mengenai transparansi BUMDES disampaikan dalam rapat desa, dan perwakilan masyarakat akan membagikannya kepada masyarakat di lingkungan mereka. Jika informasi yang disampaikan kurang jelas, masyarakat dipersilakan untuk datang langsung ke kantor BUMDes Pandu Berjaya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDES Pandu Berjaya di Desa Pandulangan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan empat indikator peran masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang dipaparkan oleh Irene (2015).

1. Masyarakat secara tidak langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan mendelegasikan wewenang pada perwakilan. Meskipun ada upaya dari manajemen untuk mendorong partisipasi tersebut melalui pertemuan-pertemuan santai dengan pengurus BUMDES, masyarakat tidak secara aktif menyampaikan pemikiran dan usulan.
2. Dalam hal implementasi, masyarakat memberikan kontribusi tenaga dan materi yang besar. Masyarakat membantu dengan menggali pipa jaringan dan memasang meteran air dari rumah ke rumah, serta berkontribusi dengan membayar iuran layanan BUMDES. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan terbatas pada fungsi mereka sebagai pengguna layanan, masih ditemukan kredit macet dari beberapa masyarakat dan kurangnya minat masyarakat untuk menyewa alat pesta
3. Kehadiran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas, masyarakat merasakan manfaat dari standar pelayanan yang prima pada usaha-usaha penyedia air bersih dan jasa penyewaan. Secara kuantitatif, manfaat tersebut tercermin dari peningkatan PADes yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat Pandulangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan BUMDes Pandu Berjaya.
4. Peran evaluasi mereka dinyatakan melalui platform formal termasuk rapat internal dan musyawarah desa, serta interaksi informal. Masyarakat secara aktif menilai kinerja manajemen dan inisiatif BUMDes. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam proses pemantauan pembangunan, yang dibantu oleh informasi yang tersedia dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes Pandu Berjaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaehe, D., Ruru, J.M. and Welson, R.Y. (2019) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara’, *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), pp. 14–24.
- Rismanita, E. and Pradana, G.W. (2022) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha



Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro', *Publika*, pp. 149–158. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p149-158>.
Tamianingsih, T. and Eprilianto, D.F. (2022) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Community Based Tourism (Studi Kasus Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)', *Publika*, pp. 1025–1040. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p1025-1040>.